DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NATUNA

LAPORAN KINERJA

2018

Kata Pengantar

Keberadaan teknologi informasi yang dimanfaatkan secara tepat akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam melaksanakan fungsinya.

Pemanfaatan TIK dibidang pemerintahan sudah diintruksikan oleh Presiden sejak tahun 2003 dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur standar operasi, kerjasama, sinergi dan integrasi organisasi serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi. Melalui E-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pelayanan pemerintah akan berlangsung secara transparan, dapat dilacak prosesnya, sehingga dapat dianggap akuntabel. Unsur penyimpangan dapat dihindarkan dan pelayanan dapat diberikan secara lebih efektif dan efisien.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna memiliki cita-cita menjadikan pemerintah yang *Smart* dengan mewujudkan mulai dengan *Smart Office*, *Smart City* dan *Smart Islands*, oleh karena itu saat ini Kabupaten Natuna ini sedang melaksanakan proses transformasi menuju e-Government yang lebih baik. Untuk mendukung e-Government yang baik Pemerintah Kabupaten Natuna mau tidak mau harus memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai dinas yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian melalui tahapan demi tahapan pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya untuk mewujudkan pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah.
Gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penjabaran dari strategi mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan pada tahun 2018 tertuang pada Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018 ini, diharapkan dapat menjadi perwujudan dari upaya Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjaga akuntabilitas kinerja dan menjadi media komunikasi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi terkait kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Melalui laporan kinerja ini pula, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi peningkatan kinerja di lingkungan internal Dinas Komunikasi dan Informatika.

Ranai, Januari 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NATUNA

RAJA DARMIKA, ST, MAP
NIP. 19741216 200003 1 003

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 disusun untuk menyajikan informasi tentang capaian komitmen kinerja yang diperjanjikan selama Tahun 2018. Laporan Kinerja ini disusun dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah serta berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 – 2021 serta dokumen perencanaan turunannya.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 yakni "*Masyarakat Natuna yang cerdas dan mandiri dalam kerangka keimanan dan budaya tempatan"* dan misi ke-6 yaitu Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Sebagai pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika maka dirumuskan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna yang diharapkan dapat dicapai untuk 5 (lima) tahun mendatang yang tertera didalam Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 adalah:

Tujuan :

Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan dan masyarakat

Sasaran :

1. Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan e-government.
2. Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah.
3. Meningkatnya pengelolaan data statistik daerah.
4. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas organisasi.

CAPAIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja ini ditetapkan kedalam 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama. Ikhtisar hasil evaluasi capaian kinerja terhadap 2 (dua) Indikator Kinerja Utama tersebut diuraikan pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel. 1.1. Ikhtisar Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2018		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan e-government	Persentase OPD yang menyelenggarakan e-Government	38,98%	47,57%	122,04%
	Persentase berita/informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan	85%	100%	117,65%

Berdasarkan dokumen Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018, untuk mencapai tujuan dan sasaran selanjutnya dituangkan dalam 8 program dan 22 kegiatan. Selanjutnya dari keempat sasaran tersebut ditetapkan 6 (enam) indikator

kinerja yang akan dicapai dan 5 (lima) indikator kinerja terealisasi >100%, 1 (satu) terealisasi 100%.

KINERJA ANGGARAN

Realisasi Belanja Langsung Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 3.280.614.634,- atau 70,96% dari Pagu DPPA sebesar Rp. 4.623.237.100,-. Adapun di Tahun 2018, persentase realisasi ini menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 93,67%.

Gambar 1.1. Perbandingan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 s/d 2018

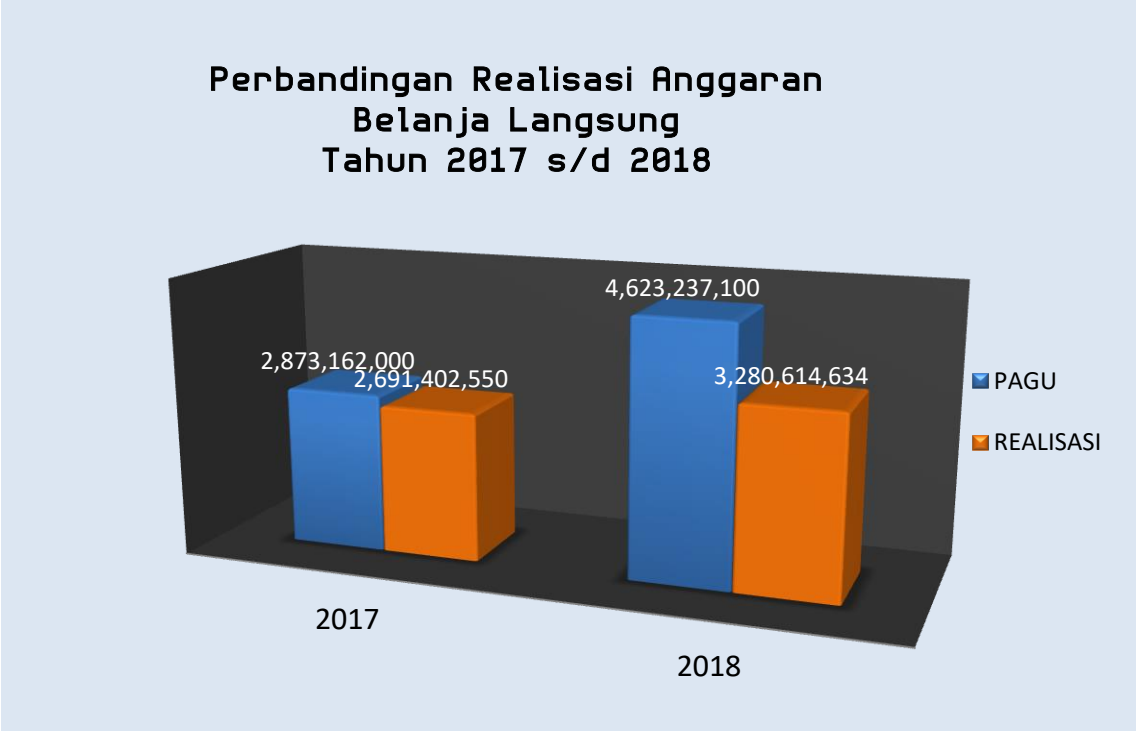

Jumlah anggaran belanja tahun 2018 pada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) murni sebesar Rp 10.281.401.106,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp 2.081.998.006,- dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp 8.199.403.100,- , setelah perubahan pada DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp 6.946.072.169,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp 2.322.835.069,-

dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp 4.623.237.100,- yang terealisasi sebesar Rp 5.591.048.684,- atau 80,49%. Sisa anggaran yang tidak terserap pada tahun ini sebesar Rp. 1.355.023.485,- terdiri dari sisa anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 12.401.019,-, dan sisa belanja langsung sebesar Rp. 1.342.622.466,-.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini, semoga dapat memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dipertanggungjawabkan tentang kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018. Selain itu juga diharapkan dapat memberi pencerahan bagi pimpinan dan seluruh staf dalam mencermati berbagai permasalahan yang dihadapi sehingga program di tahun mendatang dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi.

Daftar Isi

Halaman

KATA PENGANTAR 1
RINGKASAN EKSEKUTIF 3
DAFTAR ISI 7
DAFTAR TABEL 8
DAFTAR GAMBAR 9
DAFTAR LAMPIRAN 10

BAB I
Pendahuluan

1.1. Latar Belakang 12
1.2. Maksud dan Tujuan 14
1.3. Struktur Organisasi 16
1.4. Permasalahan Strategis di bidang Komunikasi dan Informatika 19
1.5. Sistematika Penyajian 22

BAB II
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

2.1. Rencana Strategis Diskominfo Tahun 2016-2021 25
2.2. Perjanjian Kinerja 27

BAB III
Akuntabilitas Kinerja

3.1. Capaian Kinerja Organisasi 31
3.2. Capaian Kinerja Anggaran 50

BAB IV
Penutup 57

Daftar Tabel

		Halaman
Tabel 1.1.	Ikhtisar Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	4
Tabel 2.1.	Sasaran Renstra 2016-2021 sebelum perubahan	26
Tabel 2.2.	Sasaran Renstra 2016-2021 setelah perubahan	26
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018	27
Tabel 2.4.	Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018	28
Tabel 3.1.	Indikator Pencapaian Sasaran	31
Tabel 3.2.	Tabel Formulasi Persentase OPD yang menyelenggarakan e-Government	33
Tabel 3.3.	Desa dan Kelurahan yang dapat mengakses internet	34
Tabel 3.4.	OPD yang dapat mengakses internet	35
Tabel 3.5.	Website OPD	37
Tabel 3.6.	Aplikasi OPD	39
Tabel 3.7.	Data Statistik Sektoral Tahun 2018	46
Tabel 3.8.	Kategori Capaian Kinerja	49
Tabel 3.9.	Hasil Evaluasi Manajemen KInerja	49
Tabel 3.10.	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran	51
Tabel 3.11.	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017 dan 2018	52
Tabel 3.12.	Akuntabilitas Keuangan berdasarkan belanja langsung	53

Daftar Grafik

		Halaman
Gambar 1.1.	Perbandingan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 s/d 2018	5
Gambar 1.2.	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna	17
Gambar 1.3.	Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika (per 31 Desember 2018)	18
Gambar 3.1.	Grafik perhitungan capaian indikator kinerja persentase OPD yang menyelenggarakan e-Government	42
Gambar 3.2.	Grafik perbandingan realisasi anggaran 2017 s/d 2018	50

Daftar Lampiran

1. Pengukuran Pencapaian Sasaran
2. Pengukuran Pencapaian Indikator Program dan Kegiatan
3. Rencana Stratejik Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 s/d 2021
4. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018
5. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
6. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2018
7. Pengukuran Kinerja Semester I Tahun 2018
8. Pengukuran Kinerja Semester II Tahun 2018

PENDAHULUAN

BAB 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Untuk melaksanakan transparansi publik dalam mengelola tata pemerintahan yang baik, pemerintah menerapkan penggunaan e-Government dalam salah satu tata kelola pemerintahan. Pengelolaan e-Government diperuntukan untuk G2G (*Government to Government*), G2B (*Government to Business*) dan G2C (*Government to Citizen*). Ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, karena terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna merupakan Dinas Type C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan kewenangannya. Uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Uraian Tugas
  1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan lima tahun dan tahunan sesuai dengan kewenangan lingkup tugasnya;

2) Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, dan penyelenggaraan e-Government;
3) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kebijakan dan pelaksanaan kewenangan di bidang komunikasi dan informatika;
4) Menetapkan kerja sama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah;
5) Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria atas penyelenggaraan di bidang komunikasi dan informatika;
6) Menetapkan operasional administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan aset/barang persediaan di lingkungan dinas;
7) Menetapkan operasional di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik dan di bidang penyelenggaraan e-Government;
8) Menetapkan rekomendasi/perizinan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
9) Membina Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan dinas dengan memfasilitasi peningkatan kinerja sesuai dengan fungsi dan tugasnya;
10) Pengendalian dan mengevaluasi penyelenggaraan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, dan penyelenggaraan e-government dan tugas lainnya di lingkungan dinas;
11) Menilai hasil kerja pegawai di lingkungan dinas;
12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan dinas dan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan secara berkala sebagai akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika.

◈ Fungsi

1) Merumuskan dan/atau menetapkan regulasi dan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
2) Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas dan program di lingkungan dinas;

3) Melaksanakan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, dan urusan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian serta urusan lainnya di lingkungan dinas;
4) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan di bidang komunikasi dan informatika dan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian serta urusan lainnya di lingkungan dinas;
5) Mengevaluasi penyelenggaraan kinerja pelayanan di bidang komunikasi dan informatika serta tugas lainnya di lingkungan dinas;
6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Agar keseluruhan program dan kegiatan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas dan Eselon III dan diturunkan secara berjenjang sampai dengan tingkat Eselon IV.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (Lkj) Tahun 2018 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan selama tahun 2018.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018 ini adalah untuk melakukan penilaian dan evaluasi atas pencapaian kinerja dan sasaran pembangunan di bidang komunikasi dan informatika selama Tahun 2018, sekaligus sebagai alat kendali dan pemicu peningkatan kinerja setiap unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 ini disusun dengan landasan hukum :

- Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna.

1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna, Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi:
    1. Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Produksi Informasi;
    2. Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik;
    3. Seksi Pengembangan Kemitraan dan Layanan Informasi Publik.
4. Bidang Penyelenggaraan e-Government, membawahi:
    1. Seksi Infrastruktur, Telekomunikasi dan Persandian;
    2. Seksi Statistik;
    3. Seksi Layanan e-Government.
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna dapat dilihat pada Gambar 1.2.

GAMBAR 1.2.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NATUNA

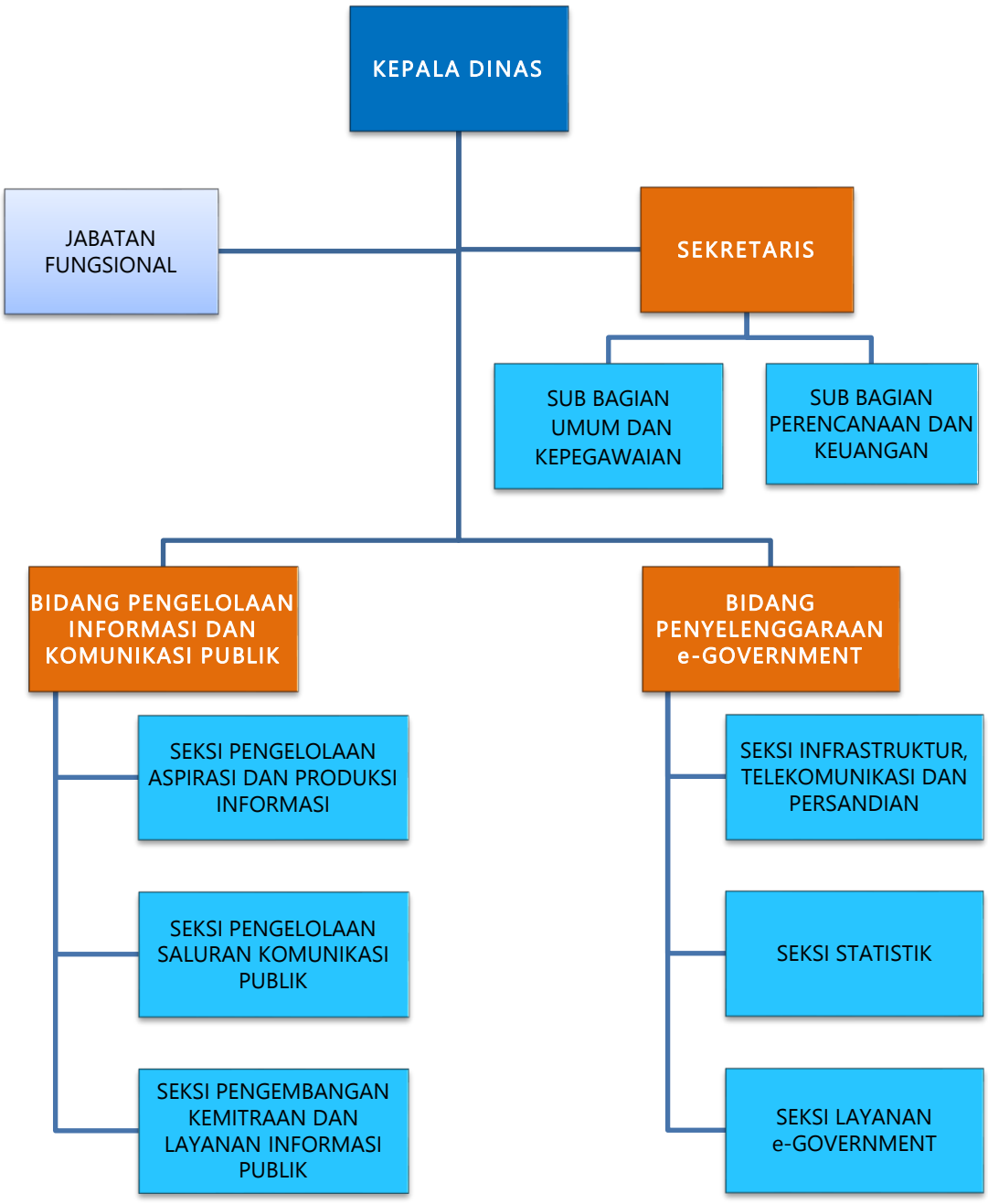

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika didukung oleh 47 orang pegawai (data per 31 Desember 2018) yang terdiri dari laki-laki sebanyak 32 orang dan perempuan sebanyak 15 orang. Dari 47 orang terdiri dari 24 orang PNS, 15 orang PTT, 6 orang Tenaga Teknis dan 2 orang Tenaga Non Teknis.

Gambar 1.3. Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika (per 31 Desember 2018)

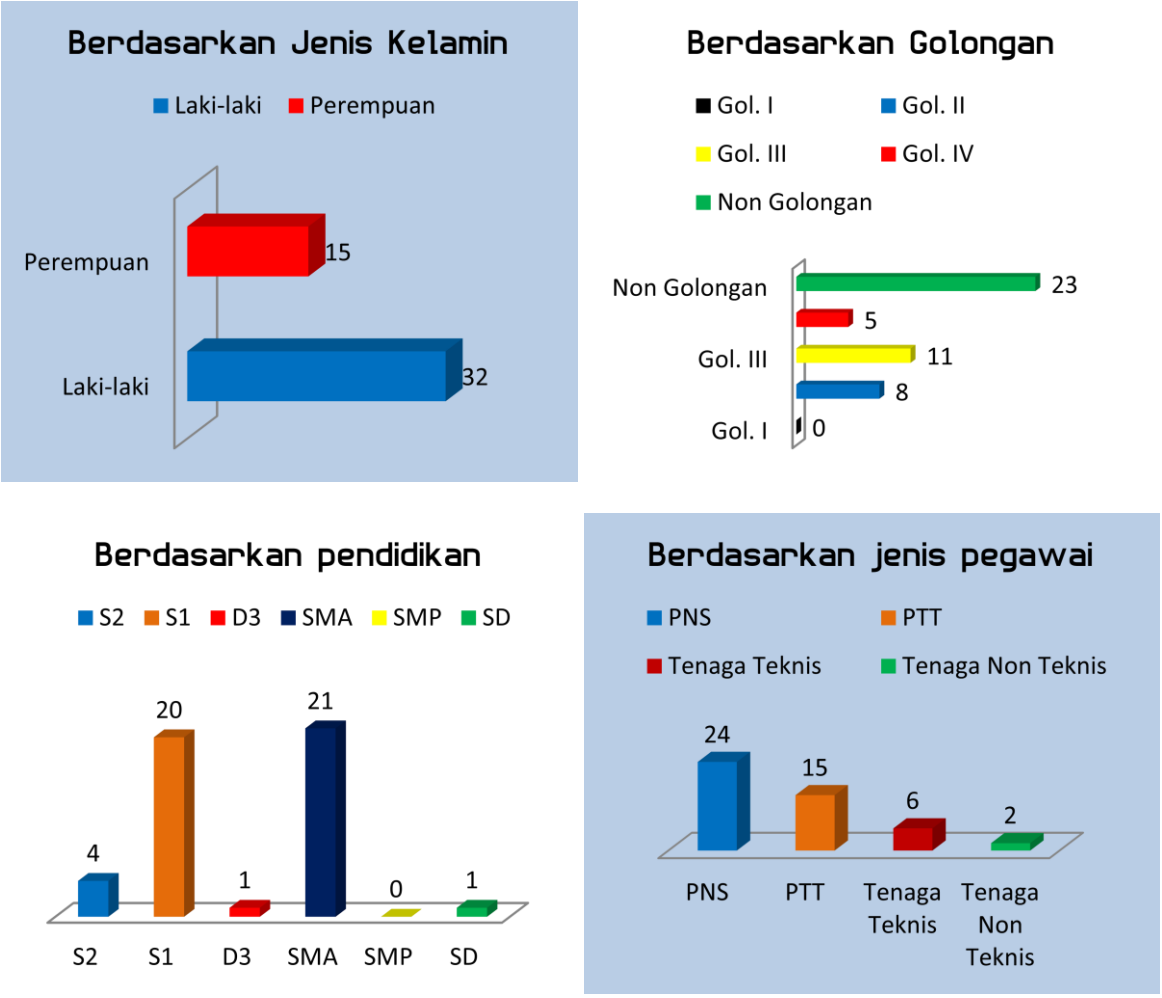

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Desember 2018)

1.4. Permasalahan strategis di bidang Komunikasi dan Informatika

Tantangan dan berbagai permasalahan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain:

- **Sumber Daya Manusia**

  Kurangnya SDM TIK. SDM bidang TIK masih tersebar diberbagai perangkat daerah, sementara untuk memenuhi kebutuhan SDM bidang TIK, Dinas Komunikasi dan Informatika mengangkat pegawai Outsorcing untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Masih rendahnya kompetensi sumber daya aparatur pengelola teknologi informasi dan komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga diperlukan peningkatan kemampuan melalui diklat/bimbingan teknis, studi banding dan sosialisasi akan pentingnya pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika.

- **Infrastruktur Telekomunikasi**

  Walaupun telekomunikasi bukan merupakan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, namun peran Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penyambung lidah masyarakat akan kebutuhan akses telekomunikasi di daerah sangat dirasakan. Tidak semua desa tercover jaringan telekomunikasi dikarenakan kondisi geografis terdiri dari pulau-pulau dan penyebaran penduduk tidak merata. Melalui koordinasi dan komunikasi dengan para penyelenggara telekomunikasi berkaitan dengan layanan telekomunikasi yang ada di Kabupaten Natuna antara lain penyampaian usulan penambahan dan peningkatan sinyal tower bts, menerima pengaduan dan meneruskan pengaduan untuk dilakukan perbaikan.

- **Infrastruktur e-Government**

  Kondisi saat ini tidak semua OPD di Kabupaten Natuna terhubung dengan akses internet, jikapun terhubung dengan akses internet hanya menggunakan *bandwidth* Vsat yang terbatas dengan biaya sewa *bandwidth* yang lebih mahal jika dibandingkan dengan menyewa *bandwidth* Fiber Optik. Akses internet masih berdiri sendiri di masing-masing instansi/OPD dan masih banyak instansi/OPD yang belum tersedia akses internet. Selain itu antar OPD belum saling terhubung jaringan Intranet karena belum tersedianya infrastruktur jalur/jaringan komunikasi antar OPD. Dengan adanya fiber optik PT. Telkom dan Palapa Ring Barat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan peluang bagi Kabupaten Natuna untuk mengembangkan serta mengimplementasikan E-Government sampai ke tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Untuk itu perlunya dibangun jalur/jaringan komunikasi Pemkab Natuna yang akan menghubungkan semua instansi Pemerintah yang ada di ibukota Kabupaten dan Kecamatan dalam satu jaringan intranet dan internet yang disebut jaringan e-Government. Sehingga jarak yang jauh antar Kecamatan ke Kabupaten tidak menjadi halangan dalam urusan koordinasi, pelayanan serta pengiriman data.

- **Regulasi**

  Adanya tugas pokok dan fungsi urusan komunikasi dan informatika yang masih tersebar di berbagai perangkat daerah sehingga masih terjadi tumpang tindih pelaksanaannya. Perumusan regulasi daerah yang mengatur tentang teknologi informasi dan komunikasi berperan penting dalam mengoptimalisasi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

- **Statistik Sektoral**

  Adanya berbagai bentuk kelembagaan penyelenggara statistik di daerah yang tersebar di berbagai perangkat daerah sehingga fungsi Dinas Komunikasi dan

Informatika yang menyelenggarakan urusan statistik sektoral sebagai walidata terhadap data dan informasi yang berkaitan dengan urusan kewenangan daerah belum dilaksanakan. Kurang lengkapnya ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas, lengkap, akurat, mutakhir, berkelanjutan, dan relevan bagi pengguna data yang tidak saja menjadi rujukan pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta dan masyarakat untuk pengembangan usaha dan beragam kebutuhan lainnya. Untuk itu diperlukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data sehingga ketika di release, masyarakat dapat dengan mudah memahami, namun kurangnya SDM yang menangani urusan statistik juga menjadi kendala terhadap terlambatnya informasi yang direlease melalui website.

- **Persandian**

  Pelaksanaan urusan persandian belum dilaksanakan secara optimal selain masalah SDM persandian yang tidak ada, ditambah lagi dengan peralatan dan regulasi yang belum mendukung di pemerintah daerah.

- **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

  Saat ini, masyarakat Kabupaten Natuna mendapatkan informasi melalui berbagai cara, yaitu: media televisi, media luar ruang, internet, radio, koran, dan media lainnya. Namun demikian, penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah saat ini masih dianggap kurang efektif, karena belum menyentuh masyarakat secara menyeluruh. Hal-hal tersebut dapat menyebabkan ketimpangan informasi dan persepsi yang berbeda-beda dari masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika terus berbenah untuk peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan penambahan konten-konten yang menarik di website pemkab maupun website Diskominfo, peningkatan mutu berita/artikel yang terupdate dan release berita yang tepat waktu. Untuk menjangkau daerah yang belum terakses internet, melalui "Kopi Pagi" (Kancah Opini Pagi) yang merupakan kerjasama dengan RRI

dengan sasaran terkelolanya informasi dan opini publik yang sedang viral dan berkembang di media kepada masyarakat dengan baik sehingga masyarakat pada akhirnya mendapatkan informasi yang jelas dan akurat (bukan informasi hoak) sehingga opini yang berkembang dapat menjadi informasi berguna untuk masyarakat.

1.5. Sistematika Penyajian

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

Sistematika Penyajian

BAB I

Pendahuluan

- Bagian ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II

Perencanaan Kinerja

- Bagian ini menguraikan tentang Rencana Strategis Tahun 2016-2021 beserta perubahan terhadap rencana strategis tersebut berdasarkan hasil reviu dan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

- Bagian ini dibagi menjadi 3 (sub bab), yaitu:
- 1. Sub Bab Capaian Kinerja Organisasi, yang menguraikan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan analisis serta evaluasi terhadap capaian kinerja tersebut, dan
- 2. Sub Bab Realisasi Anggaran, yang menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018, dan
- 3. Sub Bab Capaian Kinerja Lainnya.

BAB IV

Penutup

- Bagian ini menguraikan tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama Tahun 2018 dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun selanjutnya.

PERENCANAAN KINERJA

BAB 2

Perencanaan Kinerja

2.1. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna merupakan dokumen rencana teknis lima tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih. Disamping itu pula, diharapkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat Indonesia sangat dinamis sehingga pada Tahun 2017 telah dilakukan reviu terhadap Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 agar kebijakan yang diambil dapat diaplikasikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Reviu Renstra ini juga dilandasi oleh beberapa alasan, seperti hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa indikator dalam Renstra yang masih mencerminkan proses dan belum memperlihatkan dampak dari proses yang akan dikerjakan. Perubahan Renstra ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021.

Perubahan terhadap sasaran dan indikator dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 antara sebelum dan sesudah perubahan dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan 2.2 berikut:

Tabel .2.1. Sasaran Renstra 2016-2021 sebelum perubahan

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	
1.	Meningkatnya penyelenggaraan e-government	1.1.	Jumlah jaringan komunikasi (jaringan)
		1.2.	Sistem informasi pelayanan perijinan
2.	Meningkatnya ketersediaan media informasi pemda	2.1.	Jumlah surat kabar nasional/lokal (jenis)
		2.2.	Website milik pemerintah daerah (website)
		2.3	Pameran/expo
3.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja	3.1.	Pedikat/Nilai Akuntabilitas

Tabel .2.2. Sasaran Renstra 2016-2021 setelah perubahan

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	
1.	Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan e-government	1.1.	Persentase OPD yang menyelenggarakan e-Government
2.	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	2.1.	Persentase berita/informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan
		2.2.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan
		2.3	Jenis media sarana informasi penyenggaraan pemerintah daerah
3.	Meningkatnya pengelolaan data statistik daerah	3.1.	Persentase data statistik sektoral yang dipublikasikan

4.	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas organisasi	4.1.	Predikat/Nilai Akuntabilitas

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam Perjanjian Kinerja berisi penyataan kesepakatan kinerja yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018, secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel .2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET PK
1.	Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan e-government	1.1.	Persentase OPD yang menyelenggarakan e-Government	38,98%
2.	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	2.1.	Persentase berita/informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan	85%

Perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 diimplementasikan melalui 1 (satu) program utama yang merupakan program prioritas bagi Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dimana kegiatan-kegiatan utama yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang diperjanjikan terdapat dalam program tersebut antara lain:

1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi, Implementasi e-Government, Pembangunan Infrastruktur e-Government merupakan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU 1.1. Persentase OPD yang menyelenggarakan e-Government. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi penyediaan akses internet untuk perangkat daerah, layanan sub domain, pembangunan jaringan infrastruktur e-government.
2. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU 2.1. Persentase berita/informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi produksi dan penyebarluasan berita/informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui website www.natunakab.go.id maupun www.diskominfo.natunakab.go.id

Adapun program dan kegiatan tahun 2018 secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4. Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	
		APBD	APBD_P
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.213.109.600	2.352.350.600
1	Penyediaan jasa surat menyurat	12.000.000	12.000.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	170.000.000	170.000.000
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	53.600.000	53.600.000
4	Penyediaan alat tulis kantor	50.000.000	50.000.000
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	51.000.000	51.000.000
6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	477.500.000	477.500.000
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.000.000	15.000.000
8	Penyediaan makanan dan minuman	74.000.000	74.000.000
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	564.800.000	635.400.000
10	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	516.225.600	518.079.600

11	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	228.984.000	295.771.000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	120.000.000	120.000.000
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100.000.000	100.000.000
2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	20.000.000	20.000.000
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	180.000.000	180.000.000
1	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	180.000.000	180.000.000
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	71.060.000	86.790.000
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	71.060.000	86.790.000
V	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	5.011.967.000	1.280.830.000
1	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	1.084.654.000	254.922.000
2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	301.733.000	301.733.000
3	Implementasi e-Government	254.290.000	339.175.000
4	Pembangunan Infrastruktur e-Government	3.371.290.000	385.000.000
VI	Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	203.266.500	203.266.500
1	Operasional Kelompok Masyarakat	203.266.500	203.266.500
VII	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	150.000.000	150.000.000
1	Pengelolaan Aspirasi dan Opini Publik	150.000.000	150.000.000
VIII	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	250.000.000	250.000.000
1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	250.000.000	250.000.000
	JUMLAH	8.199.403.100	6.946.072.169

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun.

Capaian kinerja akan memberikan jawaban terhadap keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melakukan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika dalam mendukung visi dan misi Bupati. Untuk mendukung pembangunan di bidang komunikasi dan informatika tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menetapkan 4 (empat) Sasaran.

Capaian kinerja berdasarkan sasaran secara lebih detil menurut indikator kinerjanya dijelaskan sebagai berikut:

Tabel .3.1. Indikator Pencapaian Sasaran

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2017		2018		Capaian 2018
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
SASARAN 1: Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan e-government							
1.1.	Persentase OPD yang menyelenggarakan e-Government	%	34,69	35,25	38,98	47,57	122,04

SASARAN 2: Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah							
2.1.	Persentase berita/ informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan	%	80	100	85	100	117,65
2.2.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	53,33	60	60 (9 Kec. Dari 15 Kecamatan)	66,67 (10 Kec. Dari 15 Kecamatan)	111,12
2.3.	Jenis media sarana informasi penyenggaraan pemerintah daerah	jenis	3	3	3	4 (media online, media sosial, media luar ruang, radio)	133,34
SASARAN 3: Meningkatnya pengelolaan data statistik daerah							
3.1.	Persentase data statistik sektoral yang dipublikasikan	%	100	100	100	100	100
SASARAN 4: Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas							
4.1.	Predikat/Nilai Akuntabilitas		B/68	-	BB/70	BB/ 70.10	100,14

Penjelasan atas pencapaian Sasaran Strategis 1, yaitu Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan e-government diuraikan secara rinci sebagai berikut:

1.1. Persentase OPD yang menyelenggarakan e-Government

OPD yang menyelenggarakan e-Government dihitung dari beberapa kriteria/indikator yaitu :

1. Adanya akses internet (akses internet via mobile, Vsat, Fiber Optik dan sebagainya)
2. Adanya aplikasi e-Government (Offline maupun Online)
3. Adanya website

Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Tabel .3.2. Tabel Formulasi Persentase OPD yang menyelenggarakan e-Government

No.	Uraian	Perhitungan	Keterangan
1.	Persentase Instansi Pemerintah yang dapat mengakses internet	∑ Desa/Kelurahan dan OPD yang dapat mengakses internet/ ∑ Desa/Kelurahan dan OPD Kab. Natuna	∑Desa= 70, ∑Kelurahan=6 ∑OPD=43
2.	Persentase OPD yang memiliki website	∑Website OPD/∑OPD Kab.Natuna	Website menggunakan domain natunakab.go.id
3.	Persentase OPD yang menerapkan aplikasi e-Government	∑OPD menerapkan aplikasi e-Gov/∑OPD Kab. Natuna	OPD yang dihitung adalah OPD yang membuat aplikasi maupun menggunakan aplikasi nasional
Persentase OPD yang menyelenggarakan e-Government		= Hasil Formula (1 +2 +3) /3 x 100%	

Desa/kelurahan yang dapat mengakses internet adalah desa/kelurahan yang minimal dengan mobile phone dapat menjangkau akses jaringan 3G/4G sedangkan OPD yang dapat mengakses internet berdasarkan hasil data sumber daya TIK dengan anggaran untuk akses internet yang masih dikelola oleh masing-masing OPD.

Sampai dengan tahun 2018 desa yang tercoverage akses jaringan 3G/4G ada 21 Desa/Kelurahan dari 76 Desa/Kelurahan se-Kabupaten Natuna, sedangkan OPD yang dapat mengakses internet via VSat maupun Astinet sebanyak 16 OPD dari 43 OPD Kabupaten Natuna sebagaimana terlihat dari tabel 3.3. dan tabel 3.4.

Tabel 3.3. Desa dan Kelurahan yang dapat mengakses internet

NO.	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	Desa Pangkalan	Serasan
2	Desa Jermalik	Serasan
3	Desa Sepempang	Bunguran Timur
4	Desa Tanjung Batang	Pulau Tiga
5	Desa Tanjung	Bunguran Timur Laut
6	Desa Cemaga Selatan (Setengar)	Bunguran Selatan
7	Desa Payak	Serasan Timur
8	Desa Gunung Putri	Bunguran Batubi
9	Desa Pulau Tiga	Pulau Tiga Barat
10	Desa Tanjung Kumbik Utara	Pulau Tiga Barat
11	Kelurahan Ranai Kota	Bunguran Timur
12	Kelurahan Ranai Darat	Bunguran Timur
13	Kelurahan Bandarsyah	Bunguran Timur
14	Kelurahan Sedanau	Bunguran Barat
15	Kelurahan Serasan	Serasan
16	Kelurahan Sabang Barat	Midai
17	Desa Kelarik	Bunguran Utara
18	Desa Kelarik Air Mali	Bunguran Utara
19	Desa Sabang Mawang	Pulau Tiga
20	Desa Sabang Mawang Barat	Pulau Tiga
21	Desa Harapan Jaya	Bunguran Tengah

Sumber : Bidang Penyelenggaraan e-Government (Desember 2018)

Tabel 3.4. OPD yang dapat mengakses internet

NO.	NAMA OPD
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Rumah Sakit Umum Daerah
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Dinas Perikanan
7	Dinas Komunikasi dan Informatika
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
10	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
11	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
12	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
13	Sekretariat Daerah
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15	Sekretariat Dewan
16	Kecamatan Bunguran Barat

Sumber : Bidang Penyelenggaraan e-Government (Desember 2018)

Dibandingkan pada tahun 2017, pada tahun ini desa/kelurahan yang dapat mengakses internet bertambah dikarenakan peningkatan layanan oleh penyedia jasa telekomunikasi melalui koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan usulan bantuan akses internet ke Kementrian Komunikasi dan Informatika. Terdapat peningkatan jumlah tower/BTS yang pada akhir tahun 2017 berjumlah 69 menjadi 79 tower/BTS pada akhir 2018 dengan rincian Telkomsel 37 BTS, Indosat 11, XL 6, Telkom 3, Smartfrend 1, USO Perbatasan 7 dan USO Telinfo Tuntas 14..

Sedangkan jumlah OPD yang ada akses internet pada tahun 2017 sebanyak 13 OPD, ditahun 2018 menjadi 16 OPD. 15 dari 43 OPD merupakan kecamatan. Tidak semua kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna berada dalam satu daratan/satu pulau dengan Ibukota Kabupaten.

Kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau terpisah serta tidak terjangkaunya kabel fiber optik ke semua kecamatan yang ada di pulau-pulau dan pulau bunguran besar menjadi kendala utama dalam pengembangan jaringan internet. Untuk menghubungkan akses internet ke kecamatan - kecamatan menggunakan fiber optik ataupun *radio link* memerlukan biaya yang besar dan membutuhkan waktu. Saat ini jaringan fiber optik milik PT. Telkom baru melayani pelanggan untuk Kecamatan Bunguran Timur dengan jangkauan kabel yang terbatas. Akses internet di kecamatan saat ini hanya di ditunjang dari internet *mobile*. Namun tidak semua kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna sudah dilayani akses internet *mobile* dengan layanan 3G. Kondisi ini menjadi kendala bagi pemerintah daerah yang ada di Kecamatan, Kelurahan dan Desa untuk mengakses data/internet. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai dinas yang mempunyai salah satu tupoksi adalah menyediakan akses internet bagi instansi pemerintah dan publik harus mencari solusi dalam penyedia akses internet terutama untuk Kecamatan dan kelurahan yang tidak terjangkau jaringan fiber optic yaitu menggunakan satelit dan akses internet menggunakan *wireless/radio link*. Untuk akses internet menggunakan satelit biaya sangat mahal jika dibandingkan dengan akses internet menggunakan wireless yang biayanya relatif lebih murah. Namun ketidak jelasan tersedianya anggaran target kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi yang awalnya 15 kecamatan menjadi 1 kecamatan yaitu Kecamatan Bunguran Barat. Kegiatan lain yang mendukung pencapaian target akses internet untuk OPD adalah kegiatan Pembangunan Infrastruktur

e-Government. Dengan adanya fiber optik PT. Telkom dan Palapa Ring Barat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan peluang bagi Kabupaten Natuna untuk mengembangkan serta mengimplementasikan e-Government sampai ke tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Untuk itu perlunya dibangun jalur/jaringan komunikasi Pemkab Natuna yang akan menghubungkan semua instansi Pemerintah yang ada di ibukota Kabupaten dan Kecamatan dalam satu jaringan intranet dan internet yang disebut jaringan e-Government. Proses pengadaan/pelelangan di mulai pada tanggal 3 Agustus 2018. Setelah dilakukan evaluasi penawaran yang dilakukan oleh pokja ULP terhadap penawaran yang masuk tidak ada penyedia memenuhi yang memenuhi persyaratan teknis. Sehingga lelang Pembangunan Jaringan e-Government Pemkab Natuna Tahap I dinyatakan gagal lelang. Sebagaimana yang tertuang dalam berita acara gagal lelang yang dikeluarkan oleh pokja ULP. Setelah dilakukan perhitungan ulang untuk melakukan lelang ulang maka waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk melaksanakan pekerjaan selama 110 hari kalender. Pada kegiatan ini dokumen review blueprint e-Government Kabupaten Natuna dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jaringan e-Government Pemkab Natuna Tahap I telah dihasilkan dan pelaksanaan pengadaannya direncanakan kembali pada tahun 2019.

Tabel 3.5. Website OPD

NO.	INSTANSI	WEBSITE
1	PEMKAB NATUNA	https://natunakab.go.id
2	BAGIAN HUKUM	https://jdih.natunakab.go.id
3	SEKRETARIAT DAERAH	https://setda.natunakab.go.id
4	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	https://diskominfo.natunakab.go.id
5	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYANAN	https://disparbud.natunakab.go.id
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	https://disdukcapil.natunakab.go.id
7	DINAS PERHUBUNGAN	https://dishub.natunakab.go.id

8	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	https://bkpp.natunakab.go.id
9	RSUD	https://rsud.natunakab.go.id
10	UNIT LAYANAN PENGADAAN	https://ulp.natunakab.go.id
11	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	https://dpad.natunakab.go.id
12	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	https://bp3d.natunakab.go.id
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	https://dpmd.natunakab.go.id
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	https://dpmptsp.natunakab.go.id
15	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO	https://disperindagkopum.natunakab.go.id
16	BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	https://bpkpad.natunakab.go.id
17	LPSE	https://lpse.natunakab.go.id/
18	DINAS PERIKANAN	https://diskan.natunakab.go.id
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	https://dkp.natunakab.go.id/
20	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	https://disdamkar.natunakab.go.id
21	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	https://disnakertrans.natunakab.go.id
22	KECAMATAN PULAU TIGA	https://kecamatanpulautiga.natunakab.go.id
23	INSPEKTORAT	https://inspektorat.natunakab.go.id
24	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	https://dlh.natunakab.go.id
25	KECAMATAN PULAU LAUT	https://kecamatanpulaulaut.natunakab.go.id
26	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	https://www.disdikpora.natunakab.go.id
27	SEKRETARIAT DPRD	https://setwan.natunakab.go.id
28	KECAMATAN MIDAI	https://kecamatanmidai.natunakab.go.id
29	KECAMATAN SUAK MIDAI	https://kecamatansuakmidai.natunakab.go.id

Sumber : Bidang Penyelenggaraan e-Government (Desember 2018)

Peningkatan jumlah layanan untuk pendaftaran subdomain OPD pada domain natunakab.go.id meningkat pesat dari capaian tahun 2017 sebanyak 18 website menjadi 29 website OPD. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan layanan jasa telekomunikasi dan tuntutan untuk upload dokumen

perencanaan serta pengukuran kinerja ke dalam website OPD berdasarkan surat edaran dari Inspektorat Kabupaten Natuna.

Tabel 3.6. Aplikasi OPD

NO.	NAMA OPD	NO. URUT	APLIKASI E-GOVERNMENT	
			YANG TELAH DIMILIKI	BERBASIS
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.	1. DAPODIKDAS (Data Pokok Pendidikan Dasar)	Web
		2.	2. DAPODIK PAUD (Data Pokok Pendidikan PAUD)	Web
		3.	3. SIM Aneka Tunjangan Guru Dikdas	Web
		4.	4. SIM Aneka Tunjangan Guru Paudni	Web
		5.	5. SIM Rasio Guru	Web
		6.	6. NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	Web
		7.	7. SIM Realisasi Tunjangan Profesi	Web
		8.	8. SIM Realisasi Tunjangan Tamsil	Web
		9.	9. BOS	Web
		10.	10. SIMPAG (Kenaikan Pangkat Guru)	Web
		11.	11. PIP SD (Program Indonesia Pintar)	Web
		12.	12. PIP SMP (Program Indonesia Pintar)	Web
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13.	1. e-Planning	Web
		14.	2. e-Renggar	Web
		15.	3. e-Aspak	Web
		16.	4. e-Sirup	Web
		17.	5. e-Siknas	Web
		18.	6. e-Katalok	Web
		19.	7. e-Monev	Web
		20.	8. e-pbgbm	Web
3	Rumah Sakit Umum Daerah	21.	1. SIMRS	Deskstop
		22.	2. AdMail	Deskstop

4	Dinas Ketahanan Pangan	23.	1. SPDKP (Sistem Pengolahan Data Ketahanan Pangan)	Web
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24.	1. SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)	Web
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	25.	1. Prodeskel (Profil Desa dan Kelurahan)	Web
		26.	2. SIMKUDES	Web
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	27.	1. SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik)	Web
		28.	1. Sistem Aplikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Web
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	29.	1. INLIS LITE (Integrate Library System)	Web
9	Dinas Perikanan	30.	1. PUPI (Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan)	Web
10	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	31.	1. Aplikasi Natuna Travel	Web
11	Dinas Pertanian	32.	1. e-Formhorti	Web
12	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	33.	1. Online Data System (ODS)	Web
13	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	34.	1. Simrenbangda	Deskstop
		35.	2. e-musrenbangnas	Web
		36.	3. e-monev	Web
14	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	37.	1. Infis Anggaran (e-Budgetting)	Deskstop
		38.	2. Infis Perbendaharaan (e-Budget Execution)	Deskstop
		39.	3. Infis BMD (Barang Milik Daerah)	Deskstop
		40.	4. Infis Validasi (Validasi Data DAK dll)	Deskstop
		41.	5. Infis SIMKUDES (Pengelola Keuangan Desa)	Deskstop
		42.	6. Infis DigiFile (Pemberkasan Elektronik)	Deskstop
		43.	7. SIM GAJI	Deskstop
		44.	8. SIMDA BMD	Deskstop
		45.	9. INCOME POINT SIMAPATDA	Deskstop

		46.	10. INCOME POINT PBB-P2	Deskstop
		47.	11. BPHTB	Deskstop
		48.	12. GIS PBB (Geography Informasi System)	Deskstop
		49.	13. Infis SIKEKAH (Sistem Informasi Kinerja Kepegawaian Daerah)	Web
15	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	50.	1. SIJAPTI	Web
		51.	2. SAPK	Web
		52.	3. e-formasi III	Web
16	Inspektorat	53.	1. SIMHPPEMDA	Deskstop
		54.	2. Sistem Informasi Pemantauan Tindak lanjut	Deskstop
17	Setda-Bagian Pembangunan	55.	1. INFIS TEPRA	Deskstop
18	Setda-Bagian Hukum	56.	1. JDIH	Web
19	Setda-Bagian Layanan Pengadaan	57.	1. SPSE	Web
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	58.	1. E-MONEV/DAK	Web
21	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	59.	1. Aplikasi SIKS-NG 2017	Desktop dan Web
		60.	2. SIKS-KESOS	Desktop
		61.	3. SIM-PKH	Web
		62.	4. Evaluasikla.id	Web
		63.	5. SIMPONIPPPA	Web
		64.	6. Pelaporan MOLIN	Web
		65.	7. APE	Web

Sumber : Bidang Penyelenggaraan e-Government (Desember 2018)

Capaian target kinerja persentase OPD yang menyelenggarakan e-Government berdasarkan formulasi perhitungan dapat dilihat perbandingan tahun 2017 dan 2018 pada gambar 3.1.

Gambar 3.1. Grafik perhitungan capaian indikator kinerja persentase OPD yang menyelenggarakan e-Government

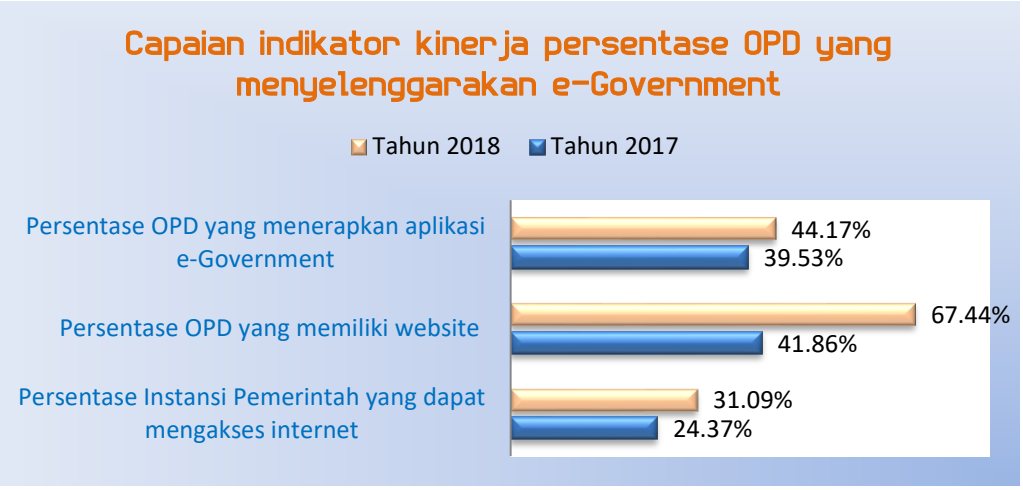

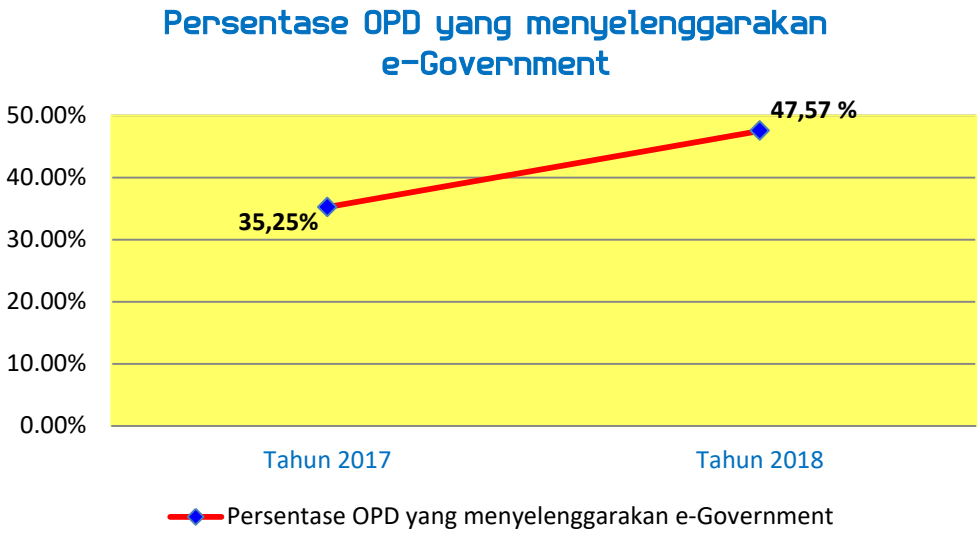

Penjelasan atas pencapaian Sasaran Strategis 2, yaitu Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah diuraikan secara rinci sebagai berikut:

2.1. Persentase berita/informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan

Dihitung berdasarkan jumlah berita/informasi yang dipublikasikan dibagi jumlah berita/informasi yang dihasilkan. Pada tahun 2018 target berita/informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dihasilkan selama satu tahun sebanyak 391 artikel dari target 600 artikel atau terealisasi 65,17% dari kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan telah diupload keseluruhan berita yang dihasilkan untuk publikasi melalui website natunakab.go.id maupun website diskominfo.natunakab.go.id. Kendala yang dihadapi dengan tidak tercapainya target artikel antara lain ketidak jelasan anggaran/maupun dana yang tersedia, kekurangan SDM sebagai jurnalis maupun kontributor juga sangat mempengaruhi.

2.2. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Sebelum Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk, s/d tahun 2016 ada 6 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang telah terbentuk di Kabupaten Natuna tersebar di beberapa wilayah kecamatan, antara lain :

1. KIM Serasan Timur, dari Kec. Serasan Timur
2. KIM Serasan, dari Kec. Serasan
3. KIM Subi, dari Kec. Subi
4. KIM Midai, dari Kec. Midai
5. KIM Zamrud dari Kec. Bunguran Utara
6. KIM Pulau Laut, dari Kec. Pulau Laut

Kemudian pada tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika melalui kegiatan Operasional Kelompok Masyarakat telah membentuk 3 (tiga) Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) , antara lain :

1. KIM Sahabat Senue, dari Desa Sepempang Kec. Bunguran Timur
2. KIM Ceruk, dari Desa Ceruk Kec. Bunguran Timur Laut
3. KIM Pasei Maghos, dari Kelurahan Sedanau Kec. Bunguran Barat

Pada tahun 2018 ini terbentuknya KIM dapat tercapai dan melebihi target. Karena dari 3 (tiga) Kecamatan yang dibentuk : Kec. Bunguran Timur, Kec. Bunguran Timur Laut, dan Kec. Bunguran Batubi, KIM dapat dibentuk sebanyak 14 (empat belas) Kelompok, antara lain:

1. KIM Mekar Jaya, dari Desa Mekar Jaya, Kec. Bunguran Barat (dibentuk secara mandiri);
2. KIM Radar, dari Kelurahan Ranai Darat, Kec. Bunguran Timur;
3. KIM Serindit, dari Kelurahan Ranai, Kec. Bunguran Timur;
4. KIM Bandarsyah, dari Kelurahan Bandarsyah, Kec. Bunguran Timur;
5. KIM Batu Merang, dari Desa Tanjung, Kec. Bunguran Timur Laut;
6. KIM Marwah, dari Desa Kelanga, Kec. Bunguran Timur Laut;
7. KIM Sengiap, dari Desa Pengadah, Kec. Bunguran Timur Laut;
8. KIM Teluk Selahang, dari Desa Limau Manis, Kec. Bunguran Timur Laut;
9. KIMTok Nyong, dari Desa Selemam, Kec. Bunguran Timur Laut;
10. KIM Putri Bertuah, dari Desa Gunung Putri, Kec. Bunguran Batubi;
11. KIM Tanjung Dara, dari Desa Semedang, Kec. Bunguran Batubi;
12. KIM Sahabat Batubi, dari Desa Batubi Jaya, Kec. Bunguran Batubi;
13. KIM Pilar Cerdas, dari Desa Sedarat Baru, Kec. Bunguran Batubi; dan
14. KIM Ketam Mangok, dari Desa Sedanau Timur, Kec. Bunguran Batubi.

Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Natuna s/d 2018 sebanyak 23 KIM. Namun pembinaan yang biasanya dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ketidakpastian anggaran/ dana yang tersedia. Kegiatan Operasional Kelompok Masyarakat hanya dapat memenuhi target kegiatan yaitu terbentuknya kelompok informasi masyarakat. Pelaksanaan pembinaan KIM yang telah terbentuk dianggarkan kembali pada tahun 2019. Cakupan pengembangan KIM telah mencapai 10 kecamatan dari 15 kecamatan yang ada, namun kendala yang masih terjadi di lingkungan masyarakat sekarang, antara lain: Rendahnya tingkat pemahaman terhadap nilai

suatu informasi yang ada, masih rendahnya jaringan komunikasi di wilayah tertentu guna menunjang penerimaan dan penyebaran suatu informasi, masih rendahnya kepedulian terhadap sarana prasarana yang ada dan masih rendahnya pemahaman masyarakat atas peluang yang ada guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan hidup. Untuk itulah perlu dilakukan pembinaan secara berkesinambungan terhadap KIM yang telah terbentuk untuk aktif menyampaikan informasi dengan transparan dan akuntabel sehingga masyarakat melek teknologi dan dapat mengakses informasi untuk kebutuhan mereka.

2.3. Jenis media sarana informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Dalam mendiseminasikan program-program pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyalurkan penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui media online (website), media sosial (facebook, twitter, instagram, dan youtube), media radio (kerjasa sama dengan RRI) pada kegiatan Pengelolaan aspirasi dan opini publik dalam acara Kancah Opini Pagi disebut "Kopi Pagi" dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang jelas terhadap topik yang sedang hangat diperbincangkan masyarakat melalui media sosial (viral) sehingga informasi yang didapat akhirnya menjadi jelas fakta dan datanya dan bukan informasi hoak, juga dengan menyajikan informasi resmi dan akurat dari lintas sektor pemerintah dalam bentuk grafis sehingga masyarakat dapat lebih mudah memahami program-program pemerintah tersebut beserta hasil-hasilnya. Penyampaian informasi kepada masyarakat diharapkan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan berkualitas baik. Perbaikan dan penambahan konten dan isi berita semakin ditingkatkan.

Penjelasan atas pencapaian Sasaran Strategis 3, yaitu Meningkatnya pengelolaan data statistik daerah diuraikan secara rinci sebagai berikut:

3.1. Persentase data statistik sektoral yang dipublikasikan

Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah dengan kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan data statistik daerah. Selain updating ketersediaan data statistik sektoral setiap tahunnya, pada tahun ini dilaksanakan Survey Pemanfaatan TIK Kabupaten Natuna melalui kerjasama Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna. Ketersediaan data statistik sektoral dari 53 data terealisasi sebanyak 55 data. Data statistik sektoral tersebut terlihat pada tabel 3.7. berikut ini:

Tabel 3.7. Data Statistik Sektoral Tahun 2018

NO.	OPD	NAMA DATA
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Pengunjung web.natunakab.go.id
		Layanan Pengaduan Masyarakat
		Jumlah Menara
		Layanan Telepon Seluler
		Layanan Internet
		Data Tower Komunikasi dan Kualitas Layanan
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data Penyebaran Penduduk
		Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
		Data Penyebaran Penduduk Per Desa/Kelurahan
3	Bagian Tata Pemerintahan	Banyaknya Desa/Kelurahan
4	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Banyaknya PNS menurut Golongan Kepangkatan
		Banyaknya PNS menurut Tingkat Pendidikan

		Banyaknya PTT menurut Tingkat Pendidikan
		Banyaknya GTT menurut Tingkat Pendidikan
		Banyaknya PTT Medis/Paramedis
5	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Pajak Daerah
		Jumlah Realisasi Belanja Daerah
6	Bagian Hukum	Data Jumlah Produk Hukum
7	PDAM Tirta Nusa	Produksi PDAM
		Wilayah Pelayanan PDAM
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro
		Jumlah Usaha Kecil dan Menengah
		Banyaknya Perusahaan Industri
		Jumlah Koperasi Yang Aktif
		Jumlah Koperasi
9	Dinas Pertanian	Luas Tanam Bahan Makanan
		Luas Panen Bahan Makanan
		Produksi Bahan Makanan
		Luas Tanam Sayuran
		Luas Panen Sayuran
		Produksi Sayuran
		Luas Lahan Perkebunan
		Produksi Perkebunan
		Jumlah Petani
		Populasi Ternak
10	Dinas Perikanan	Produksi Budidaya Ikan Laut
		Produksi Budidaya Rumput Laut
		Produksi Budidaya Ikan Air Tawar
		Jumlah Rumah Tangga Perikanan
		Produksi Hasil Tangkap Ikan Laut
11	Kantor Kementerian Agama	Banyaknya Tempat Ibadah
		Banyaknya Jemaah Haji
		Jumlah Sekolah, Guru dan Murid RA
		Jumlah Sekolah, Guru dan Murid MI

		Jumlah Sekolah, Guru dan Murid MTs
		Jumlah Sekolah, Guru dan Murid MA
		Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Pondok Pesantren
12	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)	Jumlah Dosen dan Mahasiswa
13	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)	Jumlah Kasus Pencurian Ikan
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Jumlah Hotel dan Kamar
		Jumlah Sarana dan Prasarana Seni Budaya
		Nama Objek dan Daya Tarik Wisata
15	Dinas Perhubungan	Prasarana Lalu Lintas
		Jumlah Angkutan Darat
		Jumlah Angkutan Laut

Sumber: Bidang Penyelenggaraan e-Government (Desember 2018)

Penjelasan atas pencapaian Sasaran Strategis 4, yaitu Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas organisasi diuraikan secara rinci sebagai berikut:

4.1. Predikat/Nilai Akuntabilitas

Pada tahun 2017 laporan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dari Inspektorat Kabupaten Natuna memperoleh Predikat BB dengan Nilai 70,10. Nilai tersebut tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena Dinas Komunikasi dan Informatika baru terbentuk tahun 2017. Perhitungan capaian sasaran, ditetapkan dengan penilaian rata-rata seluruh capaian indikator kinerja hasil setiap sasaran yang hasilnya dikelompokkan dalam kategori penilaian sebagaimana mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

Tabel 3.8. Kategori Capaian Kinerja

No.	Kategori	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan
3	BB	>70-80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik
5	CC	>50-60	Cukup
6	C	>30- 50	Agak Kurang
7	D	0-30	Kurang

Ruang lingkup evaluasi terdiri dari 5 (lima) komponen manajemen kinerja yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.

Tabel 3.9. Hasil Evaluasi Manajemen Kinerja

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2017
1	Perencanaan Kinerja	30	**23,17**
2	Pengukuran Kinerja	25	**17,67**
3	Pelaporan Kinerja	15	**10,43**
4	Evaluasi Internal	10	**6,33**
5	Capaian Kinerja	20	**12,50**
Total Nilai Komponen Kinerja		100	**70,10**

Dari hasil evaluasi saran/rekomendasi yang diberikan antara lain:

1. Peningkatan jumlah sasaran/target kinerja PK yang memenuhi kriteria sasaran/target kinerja yang baik;
2. Pemantauan realisasi PK secara berkala dan melakukan perbaikan jika ditemukan deviasi;
3. Penetapan mekanisme pengumpulan data kinerja yang memberi kemudahan dalam menelusuri data, memberi kemudahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengakses data dan memberitahu siapa penanggungjawab data serta kapan data disampaikan;
4. Penyusunan laporan kinerja yang menyajikan capaian kinerja, perbandingan data kinerja, informasi keuangan dan informasi dalam laporan kinerja bisa dimanfaatkan dalam perbaikan kinerja;

5. Pengevaluasian program oleh SDM yang kompeten;dan
6. Peningkatan realisasi target kinerja.

Atas saran dan rekomendasi yang diberikan Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya agar tingkat implementasi SAKIP terus meningkat dan selaras dengan target RPJMD serta perbaikan indikator kinerja sasaran akan direview pada tahun 2019 sejalan dengan review RPJMD.

3.2. Capaian Kinerja Anggaran

Realisasi Belanja Langsung Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 3.280.614.634,- atau 70,96% dari Pagu DPPA sebesar Rp. 4.623.237.100,-. Adapun di Tahun 2018, persentase realisasi ini menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 93,67%.

Gambar 3.2. Grafik perbandingan realisasi anggaran 2017 s/d 2018

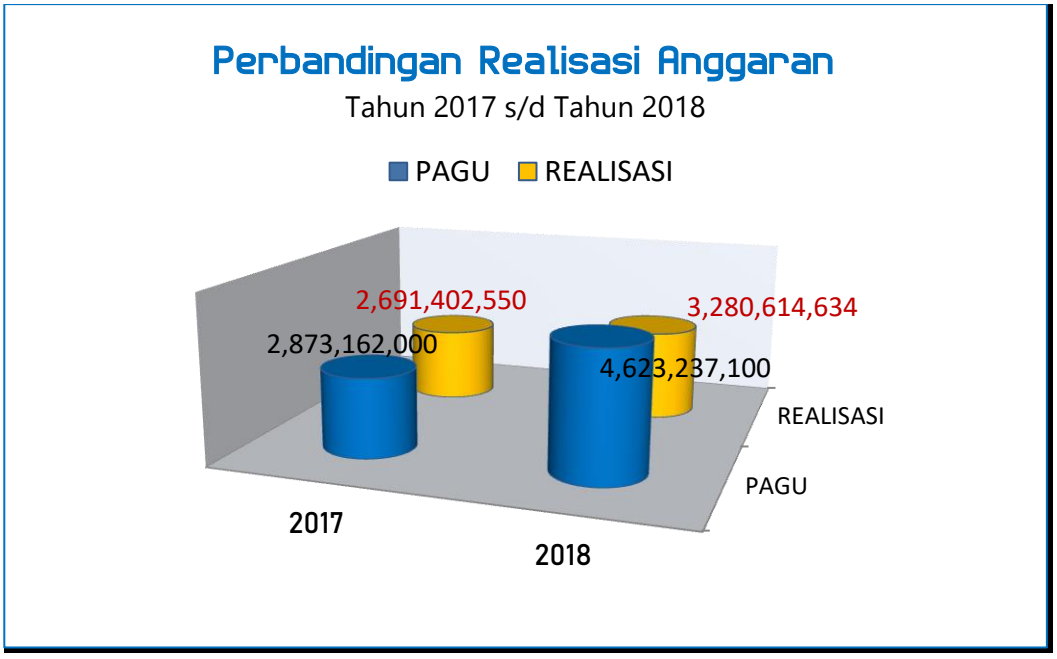

Jumlah anggaran belanja tahun 2018 pada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) murni sebesar Rp 10.281.401.106,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp 2.081.998.006,- dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp 8.199.403.100,- , setelah perubahan pada DPPA (Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp 6.946.072.169,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp 2.322.835.069,- dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp 4.623.237.100,- yang terealisasi sebesar Rp 5.591.048.684,- atau 80,49%. Sisa anggaran yang tidak terserap pada tahun ini sebesar Rp. 1.355.023.485,- terdiri dari sisa anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 12.401.019,-, dan sisa belanja langsung sebesar Rp. 1.342.622.466,-.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan pendukung untuk mendukung pencapaian IKU disajikan pada tabel 3.10. berikut:

Tabel 3.10. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan e-government	Persentase OPD yang menyelenggarakan e-Government	38,98%	47,57%	122,04%	2.080.268.000	1.527.230.894	73,42%
				JUMLAH	122.04%	2.080.268.000	1.527.230.894	73,42%
2	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase berita/informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan	85%	100%	117,65%	301.733.000	107.438.000	35,61%
		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	60%	66,67%	111,12%	203.266.500	37.421.700	18,41%
		Jenis media sebagai sarana informasi penyelenggar	3	4	133,34%	150.000.000	72.930.200	48,62%

		aan pemerintah daerah						
		JUMLAH			120,70%	654.999.500	217.789.900	33,25%
3	Meningkatnya pengelolaan data statistik daerah	Persentase data statistik sektoral yang dipublikasikan	100%	100%	100%	250.000.000	221.174.300	88.47%
		JUMLAH			100%	250.000.000	221.174.300	88.47%
4	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas organisasi	Predikat/Nilai Akuntabilitas	B/70	BB/ 70.10	100,14%	`1.637.969.600	1.314.419.540	80.25
		JUMLAH			100,14%	1.637.969.600	1.314.419.540	80,25
Perbandingan antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran					114,05 %			70,96%

Dari 6 indikator sasaran, capaian kinerja yang lebih dari 100% dari 5 (lima) sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna adalah untuk indikator kinerja Persentase OPD yang menyelenggarakan e-Government (122,04%), Persentase berita/informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan (117,65%), Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (111,12%), Jenis media sebagai sarana informasi penyelenggaraan pemerintah daerah (133,34%). Secara realisasi fisik tidak semua kegiatan dapat mencapai target dikarenakan terutama karena ketidakjelasan dana sementara dalam anggaran di DPA tersedia. Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat pada tabel 3.11. berikut ini:

Tabel 3.11. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017 dan 2018

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			
		KINERJA		ANGGARAN	
		2017	2018	2017	2018
1	Persentase OPD yang menyelenggarakan e-Government	35,25%	47,57%	557.267.100	1.527.230.894
2	Persentase berita/informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan	100%	100%	143.124.500	107.438.000
3	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	60%	66,67%	135.299.100	37.421.700

4	Jenis media sebagai sarana informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	3	4	-	72.930.200
5	Persentase data statistik sektoral yang dipublikasikan	100%	100%	110.577.600	221.174.300
6	Predikat/Nilai Akuntabilitas	-	BB/70.10	1.745.134.250	1.314.419.540
	JUMLAH			2.691.402.550	3.280.614.634

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran Belanja Langsung yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna pada Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.12. berikut :

Tabel 3.12. Akuntabilitas Keuangan berdasarkan belanja langsung

NO	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Persentase OPD yang menyelenggarakan e-Government				
	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.101.171.000	859.046.171	78,02
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	170.000.000	122.472.571	72,04
		- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	635.400.000	498.736.000	78.49
		- Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah	295.771.000	237.837.600	80,41
	2	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	979.097.000	668.184.723	68,25
		- Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	254.922.000	134.810.988	52,88
		- Implementasi e-Government	339.175.000	208.686.500	61,53
		- Pembangunan infrastruktur e-Government	385.000.000	324.687.235	84,33
		JUMLAH	2.080.268.000	1.527.230.894	73,42
2	Persentase berita/informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan				
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	301.733.000	107.438.000	35,61
		- Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	301.733.000	107.438.000	35,61
3	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan				
		Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	203.266.500	37.421.700	18,41
		- Operasional Kelompok Masyarakat	203.266.500	37.421.700	18,41

4	Jenis media sebagai sarana informasi penyelenggaraan pemerintah daerah				
		Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	150.000.000	72.930.200	48,62
		- Pengelolaan Aspirasi dan Opini Publik	150.000.000	72.930.200	48,62
5	Persentase data statistik sektoral yang dipublikasikan				
		Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	250.000.000	221.174.300	88,47
		- Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	250.000.000	221.174.300	88,47
6	Predikat/Nilai Akuntabilitas				
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.251.179.600	1.126.511.840	90,04
		- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	11.900.000	99,17
		- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	53.600.000	53.576.000	99,96
		- Penyediaan Alat Tulis Kantor	50.000.000	49.914.400	99,83
		- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	51.000.000	50.750.000	99,51
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	477.500.000	412.364.000	86,36
		- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	15.000.000	15.000.000	100
		- Penyediaan Makanan dan Minuman	74.000.000	67.251.000	90,88
		- Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	518.079.600	465.756.440	89,90
		Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	120.000.000	47.152.300	39,29
		- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100.000.000	35.839.300	35,84
		- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	11.313.000	56,57
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	180.000.000	77.719.900	43,18
		- Kursus dan Peningkatan keterampilan Aparatur	180.000.000	77.719.900	43,18
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	86.790.000	63.035.500	72,63
		- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	86.790.000	63.035.500	72,63
		JUMLAH	1.637.969.600	1.314.419.540	80,25
		TOTAL	**4.623.237.100**	**3.280.614.634**	**70,96**

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2018 telah mencukupi.

Jumlah anggaran belanja tahun 2018 pada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) murni sebesar Rp 10.281.401.106,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp 2.081.998.006,- dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp 8.199.403.100,- , setelah perubahan pada DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp 6.946.072.169,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp 2.322.835.069,- dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp 4.623.237.100,-.

Berdasarkan akuntabilitas keuangan dari Belanja Langsung sebesar Rp 4.623.237.100,- dengan alokasi sebesar Rp 2.382.001.000,- untuk mendanai 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan yang mendukung IKU Dinas Komunikasi dan Informatika, dan dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 1.634.668.894,- (68,63%) sedangkan capaian kinerja sebesar 119.85% (rata-rata capaian IKU).

Efisiensi anggaran tahun 2018 sebesar 51,53%, persentase ini diperoleh dari perbandingan antara anggaran yang mendukung IKU dengan belanja langsung, inefisiensi sebesar 48,47%, dibandingkan dengan tahun 2017 anggaran yang mendukung IKU sebesar Rp 759.046.000,- (26,42%) dengan jumlah belanja langsung sebesar Rp 2.873.162.000,-. Inefisiensi sebesar 73,58%.

Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2018 dapat menekan angka inefisiensi sebesar 25,11% dari tahun 2017. Diupayakan tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika dapat menurunkan angka inefisiensi tersebut, sehingga anggaran belanja langsung lebih banyak lagi mendukung IKU.

PENUTUP

BAB 4

Penutup

"Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2018 secara umum telah menunjukan kinerja yang baik, dilihat dari jumlah indikator kinerja yang telah melampaui target dan capaian yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian Tahun 2017. Walaupun capaian kinerja keuangan belanja langsung hanya 70,96 % dibandingkan pada tahun 2017 yang mencapai 93,67% "

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2018 ini menggambarkan kinerja dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada Tahun 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai.

Dari hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018, dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Terdapat 5 (lima) indikator yang capaiannya diatas 100% yaitu (1) Persentase OPD yang menyelenggarakan e-Government, (2) Persentase berita/informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan, (3) Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan, (4) Jenis media sarana informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, dan (5) Predikat dan Nilai Akuntabilitas.

2. 1 (satu) indikator kinerja lainnya tercapai 100% yaitu Persentase data statistik sektoral yang dipublikasikan.

Berbagai kebijakan dan upaya telah ditempuh merupakan langkah untuk mewujudkan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya dapat dirumuskan dengan saran-saran/rencana aksi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas perencanaan termasuk dalam menetapkan indikator dan target kinerja sesuai dengan konsep SMART dengan cara melakukan reviu Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 dan rencana reviu Renstra pada tahun 2019 serta memperdalam pengkajian baik dari sisi biaya maupun manfaat pada tiap rencana program, dan melakukan penetapan target kinerja yang realistis berdasarkan kajian program tersebut;
2. Pemantauan dan pengawalan pelaksanaan rencana aksi pencapaian target setiap indikator kinerja yang diukur secara berkala (per triwulan);
3. Untuk peningkatan akses internet Desa dilakukan dengan cara mengusulkan peningkatan akses jaringan ke penyedia jasa telekomunikasi maupun ke BP3TI untuk BTS program KPU/USO.
4. Untuk peningkatan akses internet OPD perlu dibangun jaringan fiber optik dalam rangka pemenuhan kebutuhan fasilitasi teknologi informasi bagi ketersediaan dan penyebaran informasi publik serta rencana penerapan aplikasi yang terintegrasi antar OPD sekaligus efisiensi anggaran belanja internet yang sebelumnya dianggarkan pada masing-masing OPD.
5. Meningkatkan kualitas berita/informasi yang ditampilkan dalam website dengan selalu update berita/informasi terbaru kegiatan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Natuna, mengingat pada saat ini kebutuhan akan informasi dan media pengakses informasi semakin banyak dan mudah diperoleh.

6. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap dan terkoordinasi serta antisipatif dan terintegrasi sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya dan sesuai dengan kebutuhan stakeholders.
7. Perlunya upaya-upaya sosialisasi dan *sharing* tugas dan fungsi serta pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga dapat dimanfaatkan oleh bagi yang berkepentingan.
8. Perlunya peningkatan kompetensi SDM khususnya terkait dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
9. Perlunya peningkatan kerjasama dengan Lembaga/satuan kerja/ organisasi/komunitas yang berkecimpung dalam program atau kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Natuna.

Lampiran

Pengukuran Pencapaian Program & Kegiatan
Tahun 2018

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	bulan	12	12	100%	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	12	100%	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	Bulan	12	12	100%	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan petugas dan peralatan	Bulan	12	12	100%	
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	Bulan	12	12	100%	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan cetakan dan fotocopy	Bulan	12	12	100%	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	10	15	150%	>100%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan bacaan pegawai	Bulan	12	12	100%	
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum pegawai	Bulan	12	12	100%	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	OK	32	52	162,58%	<100%
	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah pegawai tidak tetap	Orang	22	21	95,46%	<100%
	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	OK	50	194	388%	>100%

II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	65	61,85	95,16	<100%
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Unit	2	2	100	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	12	100	
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	%	60	58,34	97,24	<100%
	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Pegawai yang mengikuti kursus ketrampilan	Orang	8	5	62,50	<100%
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/Nilai Akuntabilitas		B/68	BB/70.10	103,09	>100%
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan kinerja OPD	Laporan	2	4	200	>100%
V.1.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase instansi pemerintah yang dapat mengakses internet	%	41,86	44,17	105,52	>100%
	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah akses internet perkantoran dan publik	Titik	1	1	100	
	Pembangunan Infrastruktur e-Government	Jumlah OPD yang terintegrasi jaringan e-government	OPD	0	0	-	Gagal lelang
V.2.		Persentase OPD yang memiliki berita/informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan	%	55,81	55,81	100	
	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Jumlah berita/informasi yang dipublikasikan	Artikel	600	391	65,17	<100%
V.3.		Persentase OPD yang menerapkan aplikasi e-Government	%	41,86	44,17	105,52	>100%
	Kegiatan Implementasi e-Government	Jumlah layanan e-government	Layanan	5	34	1.133,34	>100%
VI	Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase desa/kelurahan yang memiliki Kelompok Informasi Masyarakat	%	6,58	22,37	339,97	>100%

	Operasional Kelompok Masyarakat	Jumlah kelompok informasi masyarakat (KIM)	Kelompok	3	14	466,67	>100%
VII	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	100	103,77	103,77	>100%
	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah dokumen statistik sektoral	Dokumen	1	1	100	

Pengukuran Pencapaian Indikator Sasaran
Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2018

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan e-government	Persentase OPD yang menyelenggarakan e-Government	38,98%	47,57%	122.04%	>100%
2	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase berita/ informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan	85%	100%	117,65%	>100%
		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	60%	66.67%	111.12%	>100%
		Jenis media sebagai sarana informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	3	4	133,34%	>100%
3	Meningkatnya pengelolaan data statistik daerah	Persentase release data statistik sektoral yang dipublikasikan	100%	100%	100%	
4	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas organisasi	Predikat/Nilai Akuntabilitas	B/68	BB/70,10	103,09%	>100%

Rencana Stratejik
Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2016 s/d 2021

VISI : MASYARAKAT NATUNA YANG CERDAS DAN MANDIRI DALAM KERANGKA KEIMANAN DAN BUDAYA TEMPATAN
MISI : MEWUJUDKAN INTEGRITAS APARATUR PEMERINTAH SEBAGAI PELAYAN MASYARAKAT

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		TAHUN				
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan dan masyarakat	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas organisasi	Predikat/Nilai akuntabilitas	1. Penyusunan renstra dan renja serta pelaporan kinerja dan keuangan yang sinergis, terpadu dan berkelanjutan	Program Peningkatan Capaian Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	✓	✓	✓	✓	✓
			2. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi, sarana dan prasarana aparatur	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	✓	✓	✓	✓	✓
				2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	✓	✓	✓	✓	✓
				3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	✓	✓	-	-	✓
				4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	✓	✓	✓	✓	✓
	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan e-government	Persentase OPD yang menyelenggarakan e-Government	1. Mengoptimalkan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TIK guna memenuhi kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	✓	✓	✓	✓	✓
			2. Membangun kerjasama dengan pemerintah pusat, daerah propinsi dan kabupaten/kota lainnya dengan pihak swasta.		✓	✓	✓	✓	✓
			3. Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi		✓	✓	✓	✓	✓

			informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan e-government.						
			4. Mengembangkan website Pemerintah Kabupaten Natuna dan OPD dalam menyajikan data/informasi.		✓	✓	✓	✓	✓
	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase berita/ informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan	1. Penyebarluasan berita/artikel penyelenggaraan pemerintah daerah melalui website		✓	✓	✓	✓	✓
			2. Melaksanakan pelatihan TIK baik formal maupun non formal	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	-	✓	✓	✓	✓
		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	1. Membentuk KIM dan melakukan pembinaan serta pengembangan potensi KIM di Kabupaten Natuna		✓	✓	✓	✓	✓
			2. Membentuk radio komunitas dan melakukan pembinaan dan pendayagunaan radio komunitas		-	✓	✓	✓	✓
		Jenis media sarana informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	1. Peningkatan peran media massa dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	-	✓	✓	✓	✓
			2. Pemanfaatan media sosial untuk peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam interaksi pemerintah dan masyarakat		-	✓	✓	✓	✓
			3. Peningkatan peran pameran/expo dalam penyebarluasan informasi pembangunan daerah		-	-	✓	✓	✓
	Meningkatnya pengelolaan data statistik sektoral	Persentase data statistik sektoral yang dipublikasikan	Mengadakan kerjasama dalam survey untuk data statistik sektoral	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	✓	✓	✓	✓	✓

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **RAJA DARMIKA, ST, MAP**
Jabatan : **KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NATUNA**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. H. A. HAMID RIZAL, M.Si**
Jabatan : **BUPATI NATUNA**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Perubahan perjanjian kinerja tersebut meliputi perubahan anggaran dari Rp. 8,199,403,100.00 (Delapan Miliar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Ribu Seratus Rupiah) menjadi Rp. 4,623,237,100.00 (Empat Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah) sehingga mempengaruhi target kinerja awal. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 6 November 2018

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Drs. H. A. HAMID RIZAL, M.Si	RAJA DARMIKA, ST, MAP
	NIP. 19741216 200003 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase berita/informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan	%	85
2	Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan e-government	Persentase OPD yang menyelenggarakan e-Government	%	38.98

Jumlah Anggaran :

1.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp.	1,280,830,000.00
2.	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Rp.	203,266,500.00
3.	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Rp.	150,000,000.00
4.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	2,352,350,600.00
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	120,000,000.00
6.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	180,000,000.00
7.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	86,790,000.00
8.	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Rp.	250,000,000.00
	Jumlah	**Rp.**	**4,623,237,100.00**

Bupati Natuna,

Drs. H. A. HAMID RIZAL, M.Si

Ranai, 6 November 2018

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Natuna

RAJA DARMIKA, ST, MAP
NIP. 19741216 200003 1 003

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
GEDUNG B, PULAU SENUA, LANTAI 2, JL. BATU SISIR, BUKIT ARAI
NATUNA